

ABSTRAK

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMP) Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan Menteri Kemaritiman dan Menteri Perhubungan telah memesan 6 (enam) unit kapal latih taruna yang masing-masing ukurannya sekitar 1200 GT (*Gross Tonnage*) dengan kapasitas mencapai 300 orang yang mana dibangun digalangan kapal dan industri dalam negeri oleh PT Steadfast Marine Pontianak. pembangunan dan penyediaan enam kapal latih tersebut juga memberikan kesempatan sekolah-sekolah swasta bidang kemaritiman untuk dapat menggunakan kapal latih tersebut termasuk fasilitas praktik di dalamnya. Dengan adanya kapal latih tentu akan lebih mudah termasuk dapat membantu sekolah swasta dan akademi pelayaran yang tidak punya kapal latih. Namun pada kenyataannya terdapat gap antara lain; 1) kapal-kapal tersebut didominasi dan hanya terfokus di enam sekolah pelayaran Kemenhub yaitu Poltekel Malahayati Aceh, STIP Jakarta, Poltekel Surabaya, PIP Makassar, BP2IP Minahasa Selatan, dan BP2IP Sorong Papua Barat, yang mengakibatkan sekolah/akademi pelayaran lainnya baik negeri maupun swasta belum bisa memanfaatkannya sebagai sarana praktik dan latihan, 2) Belum adanya peraturan pengelolaan kapal latih yang sudah disediakan oleh kemenhub tersebut. Tentu hal di atas harus menjadi perhatian bagi Kemenhub dan BPSMP terutama juga bagi pemerintah untuk segera bersinergi dengan lembaga terkait untuk merumuskan dan menyusun peraturan tata kelola kapal latih bagi sekolah/akademi pelayaran yang ada di Indonesia. Sehingga, kecemburuan sosial antar institusi bisa diminimalisis dan unsur keadilan mampu dirasakan di semua sekolah/akademi pelayaran yang ada di Indonesia. Disertasi ini bertujuan untuk; 1) Untuk menganalisis Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) yang Belum Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat, 2) Untuk Menganalisis Kelemahan-kelemahan Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Saat Ini, 3) Untuk Mengonstruksi Hukum Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Yang Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *Socio-Legal*. Dan hasil dari penelitian ini adalah adanya Konstruksi Hukum Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Berupa Peraturan Baru Tentang Kapal Latih Yang Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.

Katakunci: *Konstruksi, Hukum, Kapal, BPSDMP, dan Nilai Keadilan Bermartabat.*

ABSTRACT

Agency for Human Resources Development (BPSDMP) Ministry of Transportation in coordination with the Minister of maritime and Minister of Transportation has ordered six (6) units training ship cadets that each measure approximately 1200 GT (Gross Tonnage) with a capacity of 300 people, which is built on ship and the domestic industry by PT Steadfast Marine Pontianak. The development and supply six training ship also give private schools the opportunity maritime field to be able to use the training ship including practice facilities in it. With the training ship would be more easily included to assist private schools and academy, who had no training ship. But in fact any gaps those are 1) These ships dominated and only focused on six nautical school MoT is Poltekel Malahayati Aceh, STIP Jakarta, Poltekel Surabaya, PIP Makassar, BP2IP South Minahasa, and BP2IP Sorong in West Papua, which resulted in the school / college other shipping both public and private sector can not use it as a means of practice and exercise. 2) Due to lack of regulatory management training ship that has been provided by the Ministry of Transportation. Of course the above should be a concern for the Ministry of Transportation and BPSMP especially also for the government to work together with relevant institutions to formulate and develop rules of governance training ship for school / academy in Indonesia. Thus, social jealousy between institutions could afford to justice diminimalisis and felt in all school / academy in Indonesia. This dissertation aims to; 1) To analyze the factors that affect the Management of Ships Trains Owned Agency Human Resources Development of Transportation (BPSDMP) Remaining Value-Based Justice dignified, 2) To analyze the weaknesses Management of Ships Trains Owned Agency Human Resources Development of Transportation (BPSDMP) current, 3) for the construction of Train-Owned Ship Management Legal Human Resources Development Agency of Transportation (BPSDMP) The Justice Value based dignified. This study is a qualitative research approach Socio-Legal. And the result of this research is Any Construction the Regulation of Train-Owned Ship Management Legal Human Resources Development Agency of Transportation (BPSDMP) The Justice Value based dignified.

Keywords: *Construction, Legal, Ship, BPSDMP and Dignity Justice Values.*